

RINGKASAN

SITI NURHALIZA : **Kajian Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia**
NIM. 200510029

(Dr. Yusrizal Hasbi, S.H., M.H dan Ferdy Saputra S.H., M.H)

Seiring perkembangan zaman saat ini permasalahan kekerasan dalam rumah tangga semakin tahun semakin meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, akan tetapi merambah ke dalam dunia militer. Salah satunya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan Tentara Nasional Indonesia. Bahwa telah disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terbukti bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan atau anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana dikalangan Tentara Nasional Indonesia dimana seorang prajurit yang melakukan tindak kekerasan dalam rana rumah tangganya dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peraturan militer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum serta pertanggung jawaban untuk melindungi korban terhadap Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan. Penulisan bersifat deskriptif. Dalam skripsi ini peneliti mendeskripsikan kajian yuridis terhadap proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan secara khusus dilakukan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari perlindungan sementara terhadap korban. Disarankan kepada pihak militer untuk memperhatikan permasalahan didalam keluarga karena sudah jelas telah diatur secara khusus dalam KUHPM.

Kata kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tentara Nasional Indonesia

SUMMARY

SITI NURHALIZA : *Juridical Study of the Process of Settlement of Criminal Acts of Domestic Violence Committed by the Indonesian National Army*
NIM. 200510029

(Dr. Yusrizal Hasbi, S.H., M.H dan Ferdy Saputra S.H., M.H)

As times change, the problem of domestic violence is increasing every year. Domestic violence does not only occur among ordinary people, but has penetrated into the military world. One of them is domestic violence that occurred among the Indonesian National Army. That has been mentioned in Article 1 number 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. It is proven that violence experienced by women or children which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, as well as threats to commit acts of coercion within the scope of the household. Criminal acts in the Indonesian National Army where a soldier who commits an act of violence in a domestic setting can be subject to punishment as stipulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military regulations.

This research aims to find out how the form of legal arrangements and responsibilities to protect victims of the Indonesian National Army who commit acts of domestic violence.

The research method used is normative juridical approach in this writing is a statutory approach. The writing is descriptive. In this thesis the researcher describes the juridical study of the process of resolving criminal acts of domestic violence committed by the Indonesian National Army.

The results showed that the settlement of criminal acts of domestic violence committed by the Indonesian National Army has been carried out in accordance with applicable legal provisions, namely Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Justice and specifically carried out in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which consists of temporary protection of victims. It is recommended for the military to pay attention to problems within the family because it is clear that it has been specifically regulated in the KUHPM.

Keywords : *Crime, Domestic Violence, Indonesian National Army Indonesia*